

RPSEP-65

Implementasi Program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Di Kabupaten Rejang Lebong

Eha Saleha
Yuli Tirtariandi El Anshori
FISIP-UT
e-mail: ehasaleha@ut.ac.id

ABSTRAK

Kesenjangan pengetahuan digital antara masyarakat perkotaan dan masyarakat yang terjadi di desa terpencil di Indonesia, mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKomInfo) membuat program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Program ini bertujuan mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatan internet untuk peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan. Hal ini menarik untuk dikaji dengan tujuan memberikan deskripsi khususnya tentang kendala implementasi program PLIK dan MPLIK di Rejang Lebong. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dari implementasi PLIK/MPLIK yaitu: *pertama*; dukungan sumberdaya berupa dana operasional yang rendah dan peralatan yang di bawah standar, serta operator yang tidak memiliki keahlian. *Kedua*; tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang intens antar operator PLIK/MPLIK, PT Jastrindo Dinamika dan PT WIN juga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. *Ketiga*; rendahnya partisipasi masyarakat. *Keempat*; kondisi peralatan yang rusak dan di bawah standar, besarnya biaya operasional dibandingkan pendapatan, operator yang tidak memiliki pendidikan di bidang teknologi informasi, rendahnya koordinasi dan sosialisasi serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program PLIK/MPLIK.

Kata Kunci : Kendala, Implementasi program, PLIK/MPLIK.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan digital informasi dan komunikasi agar setiap orang memiliki hak yang sama terhadap akses informasi publik. Pengembangan program internet murah melalui program MPLIK merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat. Menurut Nupikso (dalam Abrar dkk, 2013:139) bahwa dalam mengembangkan masyarakat informasi di Indonesia, peran pemerintah masih sangat dominan. Pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sekaligus sebagai operator. Upaya pemerintah ini tidak

terlepas dari proses globalisasi yang sedang berlangsung, yang oleh berbagai pihak dinilai telah menciptakan ketidakadilan di bidang teknologi informasi.

Pemerintah Indonesia merespon perkembangan tersebut melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKomInfo) dengan membuat program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Program ini bertujuan mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan. Program ini dimulai dari tahun 2010 dan pembiayaannya bersumber dari dana *Universal Service Obligation (USO)* yang berasal dari kontribusi para penyelenggara layanan telekomunikasi (operator) sebesar 1,25 persen/tahun dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (Kominfo, 2013).

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Provinsi Bengkulu, PLIK sudah terpasang sebanyak 118 unit dan MPLIK sebanyak 45 unit tersebar di seluruh kecamatan di provinsi tersebut, dan pemasangan ini dilakukan oleh pemenang tender yaitu PT Jastrindo Dinamika (Muhktar, Riaubisnis.com:2010). Khusus untuk Kabupaten Rejang Lebong telah ditempatkan sembilan unit fasilitas PLIK dan tujuh mobil PLIK di beberapa kecamatan bersama mitra terpilih dari masyarakat seperti tertera di bawah ini:

Tabel 1.1 PLIK Kabupaten Rejang Lebong

No	Kabupaten	Kecamatan	Nama Mitra	Alamat Warnet PLIK
1	Rejang Lebong	Curup	Herliardo, S.Ag	Jln. Panjaitan Gang Dharma Bakti RT.03,RW.02 Kec. Curup
2	Rejang Lebong	Bermani Ulu	Juli Haryanto	Desa Sentral Baru
3	Rejang Lebong	Selupu Rejang	Amrullah Zuhdi, S.Pd.I	Jln. Air Dukuh No.20 Kec. Selupu Rejang
4	Rejang Lebong	Curup Utara	Hendrik Kismono	Ds. Sangun Ratu, Jln. Dr.Akagani Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara
5	Rejang Lebong	Curup Utara	Pita Permata Sari	Desa Batu Panco No.20 Kel. Curup Utara
6	Rejang Lebong	Curup Timur	Maskos Pahlevi	Jl. Ahmad Yani no.170

No	Kabupaten	Kecamatan	Nama Mitra	Alamat Warnet PLIK
7	Rejang Lebong	Curup	Sanusi Pane	Curup Timur Kel. Sukaraja no. 148
8	Rejang Lebong	Curup Tengah	Mega Wati	Jl. KH. Azim Azkhari Kel. SukarajaNo. 148
9	Rejang Lebong	Curup Selatan	Yosua A Habeakan	Jl. KH. Agus Salim RT 3 RW 3 no. 2 Kel. Air putih (samping Ism perhutani)

Sumber : data olahan peneliti, 2014

Tabel 1.2 Daftar MPLIK Kabupaten Rejang Lebong

No	Kabupaten	Kecamatan	Nomor Polisi Kendaraan
1	Rejang Lebong	Air Putih Lama	B 9401 PCC
2	Rejang Lebong	Bermani Ulu	B 9394 PCC
3	Rejang Lebong	Curup Utara	B 9365 PCC
4	Rejang Lebong	Curup Utara	B 9399 PCC
5	Rejang Lebong	Curup Utara	B 9479 PCC
6	Rejang Lebong	Pasar tengah	B 9386 PCC
7	Rejang Lebong	Curup	B 9464 PCC

Sumber : data olahan peneliti, 2014

Pada beberapa tahun pelaksanaannya, menurut BP3TI KemKominfo (dalam Majalahitc.com, 2013), terdapat beberapa masalah seperti faktor kinerja penyedia jasa dan faktor fungsi sarana serta sosialisasi masyarakat melahirkan kendala yaitu KemKominfo mencatat bahwa per 7 Desember 2011 sisa PLIK yang harus dibangun yakni 418 setara 7,27% dari target 5.748 serta sisa MPLIK yang belum terealisasi 1.061 setara 55,64% dari total target 1.907.

Menurut harian online Tempo. Com (16 Juli 2013), Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Modus tindak pidana ini adalah pengadaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan operasional yang tak sesuai dengan dokumen kontrak.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah “kendala apakah yang menghambat implementasi program PLIK dan MPLIK di Kabupaten

Rejang Lebong setelah kejaksanaan agung menetapkan dua tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)?”.

KAJIAN PUSTAKA

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis kajian tentang implementasi kebijakan adalah pendapat Van Horn dan Van Meter (dalam Wahab, 2012:135) yang mengatakan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:24) juga menjelaskan bahwa ada enam variabel yang membentuk kinerja kebijakan publik, yaitu: (1) standar kebijakan dapat diartikan sebagai tujuan dan standard pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik; (2) sumber daya dan insentif implementasi kebijakan publik; (3) kualitas hubungan antar instansi yang terkait dalam proses implementasi kebijakan publik; (4) karakteristik instansi pelaksana kebijakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan kedudukan, wewenang dan fungsi masing-masing instansi yang terkait dalam proses implementasi kebijakan publik; (5) kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam wilayah implementasi kebijakan publik; dan (6) kecenderungan tanggungjawab pelaksana kebijakan yang meliputi kesadaran, arahan dan intensitas.

Meski model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:25) menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan, namun pendekatan mereka terkategori pendekatan *top-down*, standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan pada implementor melalui jaringan interorganisasional, atau dengan perkataan lain, yang terpenting adalah para implementor memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah ditetapkan, bukan turut menentukan tujuan dan standar tersebut.

Menurut Riant Nugroho (2012:679), program merupakan pelaksanaan keputusan (*decession working*) yang terkait dengan anggaran. Program didetailkan dalam bentuk proyek-proyek dan implementasinya dalam bentuk produk baik berupa pelayanan maupun barang. Istilah produk dapat diganti dengan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

Kendala-kendala dalam implementasi PLIK/MPLIK di Kabupaten Rejang Lebong

A. Ketersediaan sumberdaya yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi

PLIK dan MPLIK di Kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil , masalah sumber daya ini dapat dikategorikan lagi menjadi beberapa aspek, yaitu :

1. Insentif atau dana untuk operasional implementasi program PLIK/MPLIK di kabupaten Rejang Lebong.

Hasil temuan di lapangan diketahui bahwa sejak menerima fasilitas internet program PLIK/MPLIK, BP3TI ataupun pihak PT Jastrindo/PT Wahana Inovasi Nusantara belum memberikan insentif untuk dana operasional ataupun honor operator, seperti yang dijanjikan Rp 3.125/jam. Operator MPLIK Desa Seguring Kecamatan Curup Utara, menceritakan bahwa masalah BBM mobil, biaya operasional, dan biaya listrik PT Wahana Inovasi Nusantara tidak bertanggungjawab, tetapi ditanggung dari hasil usaha MPLIK. Jika mobil PLIK berkeliling untuk mendapatkan gaji operator, biaya solar mobil, biaya bensin untuk genset dengan total pengeluaran minimum Rp 150.000,- sedangkan pendapatan jika dihitung-hitung 8 jam dikalikan dua laptop dengan sewa Rp 2.000/jam sekitar Rp 32.000 tidak cukup untuk biaya operasional operator sehari-hari. Jika dikaji secara teoretis maka bisa mengacu kepada pendapat Daru Nupikso (dalam Abrar dkk, 2013:131) bahwa pada dasarnya kegagalan implementasi kebijakan publik lainnya faktor penyebabnya tidak jauh berbeda. KKN merupakan problem serius yang terjadi di hampir seluruh bidang dan aktivitas di Indonesia. Segala sesuatu dapat diselewengkan dan direkayasa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Berawal dari praktik KKN inilah berbagai penyimpangan lain muncul ketika kebijakan publik diimplementasikan.

2. Staf/operator PLIK/MPLIK yang memiliki keahlian dan keterampilan

Kementerian Kominfo mendelegasikan wewenang pelaksanaan PLIK/MPLIK di Indonesia kepada BP3TI sekaligus sebagai aktor pelaksana. Sebagai penerima mandat, BP3TI merumuskan berbagai kebijakan tentang PLIK/MPLIK kemudian mengimplementasikan dengan melibatkan swasta sebagai eksekutor di lapangan. Sampai di sini nampak bahwa pelaksanaan PLIK/MPLIK hanya dimaknai sebagai kebijakan teknis, sebab tugas tugas yang diemban oleh BP3TI bersifat teknis dan tidak menyentuh kelompok sasaran sebagai penerima

manfaat (pasal. 2 dan 3 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3TI).

Pelaksana lapangan (eksekutor) PLIK/MPLIK PT Jastrindo Dinamika dan PT Wahana Inovasi Nusantara (WIN) adalah penyelenggara bisnis telekomunikasi, yang dapat diasumsikan untuk penguasaan teknologi bukan menjadi kendala termasuk pemasangan infrastruktur telekomunikasi secara fisik seharusnya dapat berjalan lancar, sehingga hambatan teknologi selalu dapat diatasi dengan teknologi yang tersedia kemudian atau dengan rekayasa. Namun karena rekayasa bisnis atau semacamnya, maka teknologi yang diturunkan di lapangan tidak cukup memadai dan tidak banyak berfungsi sesuai dengan kebutuhan PLIK/MPLIK.

Begitu pula dengan mitra yang bekerja sebagai operator MPLIK merupakan lulusan sekolah menengah pertama yang tidak memiliki keterampilan yang memadai di bidang informasi teknologi dan tidak mampu menjadi teknisi untuk peralatan yang diberikan oleh PT WIN/PT Jastrindo sehingga apabila terdapat kerusakan akan sangat sulit sekali untuk diselesaikan. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan salah satu informan PLIK di Kelurahan Talang Benih, bahwa di saat dibuka satu bulan, satu laptop bisa beroperasi sedangkan 5 laptop lainnya rusak. Sepinya peminat menjadikan warnet akhirnya ditutup karena pendapatan tidak ada. Kemudian MPLIK di Desa Seguring berhenti sejak dua bulan terakhir sejak *server* meledak terkena petir. Jika merujuk kepada pendapat Purwanto, dkk (2012:87), implementor yang tidak memiliki kapasitas di bidangnya ikut andil menjadi penyebab kegagalan pencapaian tujuan kebijakan/program yang diimplementasikan. Peneliti setuju dengan pendapat di atas, operator MPLIK /PLIK harus dipilih karena kemampuannya memahami tujuan dan pedoman pelaksanaan dan teknis PLIK/MPLIK serta memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi sehingga bila terjadi kerusakan alat dan lemahnya jaringan, operator mampu mengatasinya segera dan tidak menghambat kegiatan pelaksanaan PLIK/MPLIK

3. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi program PLIK/MPLIK

Informasi yang jelas dan akurat merupakan modal bagi implementator untuk melaksanakan secara maksimal program PLIK dan MPLIK. Dari hasil wawancara di lapangan diketahui bahwa operator PLIK/MPLIK tidak berkomunikasi secara rutin dan berkoordinasi dengan pemerintah dan PT WIN/PT Jastrindo. Maka dapat dipastikan bahwa operator

PLIK/MPLIK di lapangan menjalankan prosedur sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Diketahui bahwa operator MPLIK bukan teknisi, sehingga ketika beberapa kali PT Jastrindo Dinamika ditelepon mereka tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan.

Merujuk pada temuan penelitian Radesa (2013:13), panduan sistem tata kelola PLIK/MPLIK secara umum termuat dalam buku Penyediaan KPU/USO Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kemkominfo tahun 2012, tetapi secara khusus belum ada dan sedang dalam penggodokan. Setiap program layanan yang diluncurkan oleh pemerintah harus ada buku panduan atau petunjuk, sehingga informasi bisa didapatkan dan isu-isu yang kurang sedap tentang sebuah program layanan dapat diminimalisir.

Keberadaan Buku penyediaan KPU/USO sangatlah penting sebagai petunjuk bagi operator PLIK/MPLIK mitra yang berada di pelosok desa dan sudah bisa dipastikan bahwa dengan informasi yang terbatas (buku pedoman tidak ada) maka prosedur dan standar pelayanan tidak dapat dijalankan di daerah. Begitu pula tujuan program PLIK/MPLIK yang sulit dicapai di Kabupaten Rejang Lebong.

4. Dukungan dari Pendidikan untuk mensukseskan implementasi Kebijakan

Pendidikan bisa menunjukkan peningkatan dinamika berpikir dan keahlian. Dapat dipersepsikan bahwa pendidikan dijadikan sebagai indikator tingkat kehidupan sosial. Dengan terdapatnya beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta serta sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMU di Kabupaten Rejang Lebong memberikan peluang besar bagi pemerintah pusat dan operator PLIK/MPLIK untuk menjangkau mereka yang membutuhkan akses internet untuk menunjang belajar dan studinya.

Kalangan pelajar adalah kalangan mayoritas pengguna internet seperti hasil penelitian Inasari Widyastuti (dalam Abrar, 2013:31) yang mengatakan bahwa PLIK/MPLIK dapat menjadi wahana membangun kapasitas pelajar perdesaan sehingga memiliki kemampuan setara bahkan lebih dari pelajar di perkotaan. Terlihat dari tingginya minat pelajar menggunakan layanan PLIK untuk membantu menyelesaikan tugas sekolah, mencari informasi dan memperkuat pengetahuan. Walaupun tak dapat dipungkiri, aktivitas *online* yang dilakukan pelajar didominasi dengan kegiatan hiburan seperti untuk *game online* dan jejaring sosial. Namun masyarakat umum yang berada di desa terpencil di Kabupaten Rejang Lebong merupakan petani lulusan SD dan SMP yang tidak mampu mengoperasikan komputer dan mengakses internet.

B. Kualitas hubungan inter-organisasional antara Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Operator PLIK/MPLIK serta Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sesuai pendapat operator PLIK/MPLIK.

Kualitas hubungan inter-organisasional antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dengan Operator PLIK/MPLIK serta dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditandai dengan adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Tidak adanya koordinasi antara antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dengan Operator PLIK/MPLIK serta dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Seperti yang dijelaskan oleh kepala bidang Komunikasi dan Informatika DinHubKomInfo Rejang Lebong, dalam kutipan wawancara menyebutkan bahwa karena dari pusat, mereka hanya mengikuti saja sebab bukan wewenangnya. Bahkan tidak ada koordinasi. Pendapat tersebut sejalan dengan keterangan dari operator PLIK Desa Seguring bahwa Dinas Perhubkominfo tidak mengerti. Menurutnya itu adalah dana pusat yang digunakan untuk kecamatan tertinggal sehingga kadang-kadang pihak Pemkab juga tidak tahu.

2. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari komunikator ke komunikan atau dari pemerintah pusat maupun ke daerah.

Misalnya antara operator PLIK/MPLIK dengan PT WIN/PT Jastrindo Dinamika lebih sering dilakukan satu arah seperti yang diceritakan oleh salah satu informan, Ji. Menurutnya, seringkali jika ada masalah operator memecahkan sendiri karena komunikasi dengan PT WIN sering terputus. Jika dibandingkan dengan pendapat Edward III (dalam Nugroho, 2012:693), untuk menghindari distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan perlu adanya ketetapan waktu dalam menyampaikan informasi seperti jadwal rutin untuk sosialisasi dan monitoring, harus jelas informasi yang disampaikan (sesuai SOP dan Pedoman pelaksanaan program) serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi (komunikasi efektif).

C. Partisipasi masyarakat dalam implementasi PLIK dan MPLIK

Keikutsertaan masyarakat dalam program PLIK/MPLIK tidak dapat dilihat secara langsung oleh peneliti karena kondisi warung internet PLIK maupun Mobil PLIK sudah tidak lagi beroperasi sehingga peneliti tidak dapat mengukur langsung seberapa tinggi partisipasi masyarakat terhadap program ini. Namun informan dari Desa Seguring menyatakan bahwa anak-anak, masyarakat biasa juga ada yang mengakses internet, masyarakat pengguna, juga para ibu yang mencari resep masakan untuk pertanian. Anak-anak juga sudah bisa membuka internet.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kendala dalam implementasi PLIK/MPLIK adalah dukungan sumberdaya baik dana atau berbagai insentif yang rendah sehingga tidak dapat memfasilitasi keefektifan implementasi PLIK dan MPLIK di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu keterbatasan dana operasional dan tidak adanya subsidi biaya operasional dari pemerintah, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh operator PLIK/MPLIK di Kabupaten Rejang Lebong menjadi sumber kegagalan implementasi program PLIK/MPLIK. Kemudian kendala lainnya adalah tidak adanya hubungan inter-organisasional antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, PT Jastrindo Dinamika/PT WIN dengan dinas PerhubKomInfo Kabupaten Rejang Lebong dan operator PLIK/MPLIK serta pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, baik dalam bentuk koordinasi dan komunikasi selama operator menerima fasilitas dan peralatan dari tahun 2011 sampai dengan sekarang.

Keikutsertaan masyarakat dalam program PLIK/MPLIK tidak dapat dilihat secara langsung karena kondisi warung internet PLIK maupun Mobil PLIK sudah tidak lagi beroperasi. Sulit mengukur langsung seberapa tinggi/rendah partisipasi masyarakat terhadap program ini. Namun dari hasil wawancara dengan operator PLIK/MPLIK dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dalam implementasi PLIK dan MPLIK sangat kurang disebabkan karena rendahnya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap internet, sosialisasi yang tidak rutin dan terjadwal, serta proses monitoring yang tidak berjalan dengan baik. Partisipasi yang rendah itu didominasi oleh kalangan pelajar dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadyha, dkk (2013), *Implementasi Program SUO*, Yogyakarta: Tiara Wacana Lokus
- Bungin, Burhan (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana
- BP3TI (2012). *Penyediaan KPU/ USO: Melalui USO, Kita Buka Kemudahan Akses Informasi Hingga Pelosok Negeri*. Jakarta: Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika (BP3TI). Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Dyah, Sulistyastuti R dan Erwan, Purwanto A (2002). *Implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Ibrahim, Erwin. (2012), *Mengapa MPLIK? Didalam Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi Di Banyuasin*. Sumatera Selatan. Pemkab Banyuasin
- Ibrahim, Idi Subandy, (2011). *Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media, dan Gaya Hidup dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2009.
----- Dalam Angka Tahun 2012
- Moleong, Lexy (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. Rosdakarya
- Nugroho, Riant (2012). *Public Policy*. Jakarta. Gramedia
----- (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 48/PER/ M.KOMINFO/ 11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 48/Per/M.Kominfo/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan.
- Radesa, Dodi. (2013). *Sistem Tata Kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Subarsono, AG, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sugiyono (2008). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Solichin, Wahab Abdul (2012). *Analisis kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara

Sopia, Hanni dan Prianto, Budhi (2010). *Akses Internet*. Yogyakarta. Kriya Pustaka

Tachjan (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Winarno, Budi (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Media Persindo

Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/24/1219472/DPR.Ada.4.Temuan.Bobroknnya.Proyek.Melek.Internet.Kemenkominfo> diakses 20 November 2013 pukul 10. 25 Wib

<http://riaubisnis.com/insidex.php/tech-mainmenu-30/telekomunikasi> diakses 20 desember 2013 pukul 10.00Wib

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-13-I-P3DI-Juli-2013-20 diakses tanggal 29 Nopember 2013 pukul 21.45Wib

<http://id2.dishubkominformobanjab.go.id/?p=234> diakses tanggal 02 Oktober 2013 pukul 09.33 Wib

www.merdeka.com/teknologi/tifatul-curhat-soal-tujuan-awal-plikmplik.html diakses tanggal 29 Desember 2013 pukul 22.00 Wib

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/02/msi5ye-kominfo-percepat-distribusi-mobil-internet-kecamatan> diakses tanggal 29 Desember 2013 pukul 10. 01 Wib

<http://techno.okezone.com/read/2013/12/29/54/918816/evaluasi-proyek-mplik-kemenkominfo-bentuk-tim-investigasi> diakses tanggal 05 Januari 2014 pukul 19.05 Wib

http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_2097.htm diakses tanggal 31 Januari 2014 pukul 21.09 Wib

<http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.com> diakses tanggal 31 Januari 2014 pukul 22.07 Wib

<http://budinugroho24.wordpress.com> diakses tanggal 31 Januari 2014 pukul 20.40 Wib

[www. Antaranews.com.nasional summit 2009](http://www.antarane.ws.com/nasional-summit-2009) diakses 31 januari 2014 pukul 19.55 Wib

[http://utariangraini, blog](http://utariangraini.blogspot.com) diakses 25 April 2014 pukul 22.30 Wib

<http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Rekap> diakses tanggal 27 April 2014 pukul 09.00 Wib.

[http://www.kominfo.go.id/sebaran kpu-uso](http://www.kominfo.go.id/sebaran-kpu-uso) diakses tanggal 20 Februari 2014 pukul 11.00 Wib

<http://media.kompasiana.com>, diakses tanggal 26 Januari 2014 22.01 Wib

<http://azhariah-rachman.blogspot>. diakses tanggal 20 Maret 2014 pukul 20.07 Wib

<http://kesenjangedigitalbppn.blogspot>, di akses tanggal 22 Mei 2014
pukul 00.00Wib